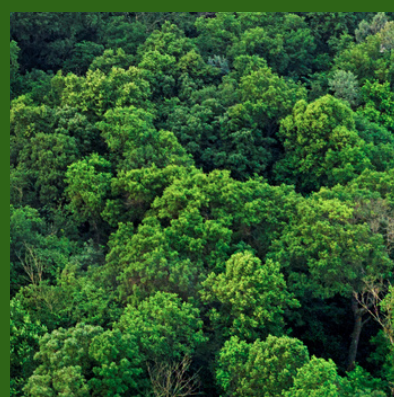
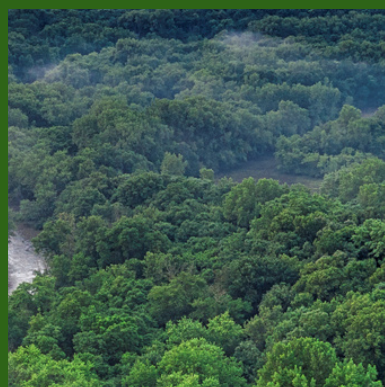


Ketika 70% Kebijakan Iklim Gagal: Mengapa Green Democracy Relevan untuk Indonesia

Demokrasi Hijau, Bumi Sehat :
Sebuah Perspektif dari Bahar Buasan

Dr. (c) Bahar Buasan, ST., M.S.M., M.Sc

Hak Cipta © 2026 Kontika Research and Innovation



Ketika 70% Kebijakan Iklim Gagal: Mengapa Green Democracy Relevan untuk Indonesia

Demokrasi Hijau, Bumi Sehat :
Sebuah Perspektif dari Bahar Buasan

Acuan: Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI, meluncurkan buku berjudul "Green Democracy", yang menekankan keseimbangan antara demokrasi dan ekologi untuk masa depan, melambangkan harapan dan kemakmuran dengan fokus pada alam dan manusia. Buku ini diluncurkan sekitar September/Oktober 2024, dan bisa diakses melalui media sosialnya (IG: @sbnajamudin)

Penulis:
Dr. (c) Bahar Buasan, ST., M.S.M., M.Sc
www.baharbuasan.id

Penerbit:
Kontika Research and Innovation
Jakarta, Indonesia
Tahun Terbit : 2026

Seluruh isi dalam publikasi ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

01 Pembuka: Alarm yang Terabaikan



Green democracy mengintegrasikan prinsip lingkungan berkelanjutan ke dalam proses demokrasi, memastikan kebijakan publik tidak hanya melindungi hak politik warga tetapi juga hak atas udara bersih, air layak, dan ekosistem sehat yang mendukung kehidupan generasi mendatang. Konsep ini lahir dari kritik terhadap demokrasi konvensional yang sering mengorbankan alam demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, seperti yang terlihat di Indonesia di mana deforestasi dan polusi udara melemahkan kualitas demokrasi karena rakyat kehilangan suara ekologisnya. Di Indonesia, green democracy mendorong partisipasi publik melalui citizens' assemblies dan kebijakan seperti green constitution serta green budgeting untuk menyeimbangkan pembangunan dengan keadilan lingkungan.

Laporan UNDP Global Climate Report 2024 mengungkap fakta yang menggetarkan: 70% kebijakan iklim di seluruh dunia dinyatakan gagal mencapai target yang ditetapkan.¹ Kegagalan ini bukan disebabkan oleh minimnya dana atau keterbatasan teknologi—melainkan oleh lemahnya koherensi dan integrasi politik dalam pengelolaan krisis iklim. Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa yang sesungguhnya salah dengan cara kita menangani krisis iklim?

UNEP Emissions Gap Report 2024 memperkuat kekhawatiran ini dengan menyatakan bahwa kebijakan yang ada saat ini akan membawa bumi menuju peningkatan suhu hingga 2,6-3,1°C pada akhir abad ini—jauh melampaui ambang batas 1,5°C yang ditetapkan Perjanjian Paris.² Emisi gas rumah kaca global mencapai rekor tertinggi 57,7 miliar ton CO₂ ekuivalen pada 2024, sementara komitmen negara-negara untuk menurunkan emisi masih jauh dari cukup.

¹ United Nations Development Programme. (2024). UNDP Global Climate Report 2024. UNDP.

² United Nations Environment Programme. (2024). Emissions Gap Report 2024: No more hot air... please! UNEP. <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024>

Konteks Indonesia

Indonesia menyaksikan sendiri dampak nyata krisis iklim melalui rentetan bencana ekologis yang semakin intens. Tragedi banjir bandang dan longsor yang menghantam Sumatra pada November 2025 menorehkan catatan kelam sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terparah dalam sejarah modern negeri ini.³ Hujan ekstrem yang dipicu oleh Siklon Tropis Senyar—fenomena langka yang terbentuk di dekat ekuator—mengakibatkan lebih dari 900 korban jiwa, 276 orang hilang, dan lebih dari 835.000 jiwa mengungsi di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dampak Bencana Banjir Sumatra November 2025

Indikator	Data
Korban meninggal	916-940 jiwa
Korban hilang	274-392 orang
Pengungsi	>835.000 jiwa
Kerugian ekonomi	Rp68,67 triliun
Infrastruktur rusak	405 jembatan, 697 sekolah, 199 faskes

Sumber: BNPB (2025); Celios (2025)

Para ahli menegaskan bahwa bencana ini bukan semata-mata fenomena alam, melainkan manifestasi dari "dosa ekologis" jangka panjang. Dr. Hatma Suryatmojo dari UGM menyatakan bahwa degradasi ekosistem hutan di hulu DAS telah mengurangi kapasitas ekologis wilayah untuk menyerap dan mengatur curah hujan yang tinggi.⁴ Sumatra Barat kehilangan sekitar 740.000 hektare tutupan pohon dalam periode 2001-2024, sementara Pulau Sumatra diperlakukan sebagai "zona pengorbanan" dengan sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan aktif seluas 2,45 juta hektare.

Paradoks yang mencolok: Indonesia adalah negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia—mencakup sekitar 126 juta hektare atau 10% dari luas hutan tropis global.⁵ Indonesia juga memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia dengan luas 3,63 juta hektare atau 20,37% dari total mangrove global.⁶ Namun, masyarakatnya tetap rentan terhadap bencana iklim—sebuah kontradiksi yang menuntut penjelasan lebih dalam tentang kegagalan tata kelola.

Tesis Artikel

Kegagalan kebijakan iklim bukan sekadar masalah teknis—ini adalah masalah demokrasi. Dibutuhkan paradigma baru: Green Democracy—sebuah konsep demokrasi yang menempatkan ekologi sebagai pilar fundamental dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Gagasan ini diusung oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin sebagai jawaban atas kebuntuan demokrasi konvensional yang gagal merespons krisis iklim.

3 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Data Bencana Banjir dan Longsor Sumatra November-Desember 2025. BNPB.

4 Suryatmojo, H. (2025). Bencana Banjir Bandang Sumatra dan Degradasi Hutan di Hulu DAS. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/en/news/ugm-expert-severe-sumatra-flash-floods/>

5 IPB Digitani. (2024). Indonesia Sebagai Pemilik Hutan Hujan Tropis Terbesar Ketiga di Dunia. <https://digitani.ipb.ac.id/>

6 Kementerian Sekretariat Negara. (2022). Arti Pesan Mangrove Indonesia di G20: Atasi Krisis Iklim Global. <https://www.setneg.go.id/>

02 Anatomi Kegagalan: Mengapa Kebijakan Iklim Tidak Bekerja?



Demokrasi yang Mahal dan Eksploitatif

Salah satu akar permasalahan terletak pada biaya politik yang sangat tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Untuk Pemilu 2024, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran hingga Rp71,3 triliun—naik 57,3% dibandingkan Pemilu 2019.⁷ Sementara itu, riset Westminster Foundation for Democracy mengungkap bahwa rata-rata biaya kampanye seorang caleg DPR mencapai Rp5 miliar, dengan rentang Rp200 juta hingga Rp160 miliar.⁸

Biaya politik yang fantastis ini menciptakan siklus destruktif: politisi membutuhkan dana besar untuk berkampanye, yang kemudian mendorong ketergantungan pada donor-donor bermodal besar—seringkali dari sektor industri ekstraktif. Konsekuensinya, kebijakan publik cenderung mengakomodasi kepentingan jangka pendek para penyandang dana, termasuk izin eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Biaya Demokrasi Indonesia

Komponen	Nilai
Anggaran Pemilu 2024 (APBN)	Rp71,3 triliun
Rata-rata biaya kampanye caleg DPR	Rp5 miliar
Biaya minimum kampanye caleg	Rp200 juta
Biaya maksimum kampanye caleg	Rp160 miliar
Total prediksi pengeluaran Pemilu 2024	Rp294,5 triliun

Sumber: Kemenkeu (2024); Westminster Foundation for Democracy (2024); CORE Indonesia (2023)

⁷ Kementerian Keuangan. (2024). Menghitung Biaya Demokrasi. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/>

⁸ Prihatini, E. S., & Wardani, S. B. E. (2024). Riset Biaya Politik Caleg dalam Pemilu 2024. Westminster Foundation for Democracy.

PPATK bahkan menemukan transaksi mencurigakan senilai Rp51,47 triliun oleh 100 caleg, dengan indikasi sebagian dana kampanye berasal dari tambang ilegal.⁹ Situasi ini membuktikan bahwa demokrasi yang mahal dan membutuhkan banyak energi terkait erat dengan pola eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Disconnect antara Kebijakan dan Realitas Lapangan

Kebijakan iklim seringkali dirumuskan di ruang-ruang rapat Jakarta, tanpa melibatkan suara petani, nelayan, atau masyarakat adat yang paling merasakan dampak krisis iklim. Tidak ada partisipasi substantif masyarakat dalam politik lingkungan—hanya "demokrasi janggut" di mana keputusan diambil oleh segelintir elit, bukan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Peoples' Climate Vote 2024 yang dilakukan UNDP dan Universitas Oxford terhadap 77 negara menunjukkan bahwa 80% masyarakat global menginginkan negaranya berbuat lebih dalam mengatasi perubahan iklim, dan 69% menyatakan bahwa perubahan iklim memengaruhi keputusan besar dalam hidup mereka.¹⁰ Namun, aspirasi ini jarang diterjemahkan dalam kebijakan nyata.



Orientasi Jangka Pendek

Politisi berpikir dalam kerangka waktu lima tahun—siklus pemilu—bukan 50 tahun ke depan yang dibutuhkan untuk transisi keberlanjutan. Ekonomi jangka pendek selalu diutamakan atas keberlanjutan jangka panjang. Ketika dihadapkan pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi instan melalui ekstraksi alam versus perlindungan lingkungan yang memerlukan investasi jangka panjang, pilihan politik hampir selalu jatuh pada yang pertama.

Data proporsi petahana yang terpilih kembali meningkat dari 25,2% pada 2009 menjadi 56% pada 2024.¹¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia semakin menguntungkan mereka yang sudah berkuasa dan memiliki akses ke sumber daya—bukan mereka yang membawa gagasan transformatif tentang keberlanjutan.

⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2023). Temuan Transaksi Mencurigakan Terkait Dana Kampanye Pemilu 2024. PPATK.

¹⁰ United Nations Development Programme & University of Oxford. (2024). The Peoples' Climate Vote 2024. UNDP. <https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote-2024>

¹¹ ANTARA News. (2025, Januari 7). Biaya Politik Pemilu Legislatif 2024 Melonjak Hingga Rp5 Miliar. <https://aceh.antaranews.com/>

Fragmentasi Kelembagaan

Kebijakan iklim tersebar di banyak kementerian tanpa koordinasi solid. Ego sektoral mengalahkan kepentingan ekologis bersama. Tidak ada "green coherence" dalam tata kelola pemerintahan—sebuah kondisi di mana setiap kebijakan seharusnya diuji terlebih dahulu dampak ekologisnya sebelum diimplementasikan.

03 Green Democracy: Paradigma Baru yang Ditawarkan

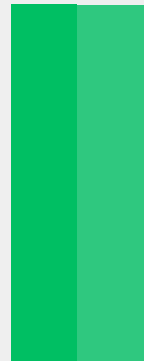


Apa Itu Green Democracy?

Green Democracy adalah gagasan yang diusung oleh Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI, sebagai redefinisi politik etis di abad ke-21. Konsep ini menawarkan keseimbangan antara prinsip demokrasi (check and balances) dengan kesadaran ekologis.¹²

"Green Democracy bukan sekadar menanam pohon seremonial. Ia adalah praktik demokrasi yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai jantung tata kelola pemerintahan," jelas Sultan dalam kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.¹³ Hijau dalam konsep ini bukan sekadar warna—melainkan simbol harapan, pertumbuhan, kemakmuran, dan keseimbangan antara manusia dengan alam.

Sebagai wujud komitmen terhadap gagasan ini, DPD RI telah menetapkan 9 November sebagai Hari Green Democracy dan mendirikan Green Democracy Institute sebagai pusat advokasi dan pemikiran untuk memperkuat mitigasi perubahan iklim.¹⁴



¹² CNN Indonesia. (2025, November 11). Jadi Pembicara di COP30, Ketua DPD RI Tawarkan Gagasan Demokrasi Hijau. <https://www.cnnindonesia.com/>

¹³ Harjan Bhirawa. (2025, November 30). Ketua DPD RI Tawarkan Konsep Green Democracy, Politik Santun pada Manusia dan Alam. <https://harianbhirawa.co.id/>

¹⁴ Warta Kota. (2025, November 13). DPD RI Tetapkan 9 November sebagai Hari Green Democracy. <https://wartakota.tribunnews.com/>

Prinsip-Prinsip Utama

Green Democracy dibangun di atas empat pilar fundamental:



Kritik terhadap Demokrasi Konvensional

Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan kritik tajam: "Sulit menyebut demokrasi itu baik ketika masyarakatnya maju tetapi lingkungan rusak."¹⁵ Demokrasi yang hanya melayani manusia, tanpa menghormati alam, adalah demokrasi yang tidak lengkap.

Green Democracy mengusulkan transformasi dari demokrasi antroposentris—yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya—ke demokrasi ekosentris, di mana kepentingan ekosistem dan generasi mendatang turut dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan politik.

"Demokrasi yang kita jalankan hari ini lebih banyak melahirkan politisi yang sekadar menghitung perolehan suara dan untung rugi, daripada negarawan yang memikirkan keberlangsungan hidup generasi mendatang," tutup Sultan dalam refleksi kritisnya.¹⁶

15 LLDIKTI Wilayah V. (2025). Ketua DPD RI Dorong Green Democracy sebagai Koreksi Dominasi Ekonomi atas Ekologi. <https://lldikti5.kemdiktisaintek.go.id/>

16 Berita Buana. (2025, November 29). Ketua DPD RI Tawarkan Konsep Green Democracy di UMY. <https://beritabuana.co/>

04 Relevansi untuk Indonesia: Mengapa Harus Sekarang?



Indonesia di Persimpangan Kritis

Indonesia memiliki modal alam yang luar biasa untuk memimpin transisi global menuju keberlanjutan:

Aset Ekologis

Hutan hujan tropis

~126 juta Ha
Terluas ketiga di dunia

Ekosistem mangrove

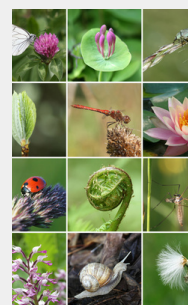
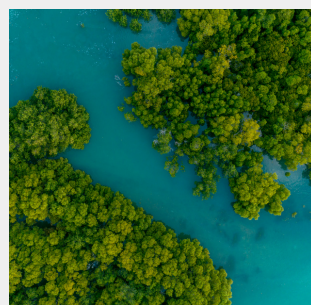
3,63 juta Ha / 20,37% global
Terluas di dunia

Keanekaragaman hayati

10% spesies tumbuhan dunia, 12% mamalia dunia

Potensi penyimpanan karbon laut dalam

Hingga 600 gigaton karbon



Namun, Indonesia juga menghadapi deforestasi masif, pencemaran, dan kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. Setiap tahun, Indonesia kehilangan jutaan hektare hutan, dan tragedi Sumatra 2025 adalah bukti nyata bagaimana kerusakan ekologis dapat berubah menjadi bencana kemanusiaan.¹⁷

¹⁷ Mongabay Indonesia. (2025, Desember 1). Peringatan Keras dari Bencana Sumatera. <https://mongabay.co.id/>

Konstitusi Sudah Siap, Implementasi yang Tertinggal

Secara konstitusional, Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan kuat untuk Green Democracy:

- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Indonesia sudah punya "green constitution"—tetapi belum punya "green politics". Amanat konstitusi tentang lingkungan hidup yang baik dan pembangunan berkelanjutan masih jauh dari implementasi yang konsisten.

Kelompok Rentan yang Terabaikan

Krisis iklim tidak berdampak setara pada semua orang. Kelompok yang paling terdampak justru yang paling tidak memiliki suara dalam kebijakan:

- Masyarakat adat di pedalaman yang bergantung langsung pada hutan
- Komunitas di pulau-pulau kecil yang terancam kenaikan muka air laut
- Petani dan nelayan yang mata pencahariannya bergantung pada stabilitas iklim

Green Democracy menawarkan representasi ekologis yang memastikan suara kelompok-kelompok ini turut diperhitungkan dalam setiap kebijakan yang memengaruhi lingkungan hidup mereka.



Momentum Politik

Beberapa perkembangan politik terkini membuka ruang bagi implementasi Green Democracy:

- Pemerintahan baru dengan Asta Cita yang membuka peluang reformasi kebijakan
- DPD RI menginisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai Prolegnas Prioritas 2025¹⁸
- RUU Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat sedang dipersiapkan sebagai payung hukum kelompok rentan
- Ketua DPD RI menjadi pembicara kunci di COP30 Brasil, membawa gagasan Green Democracy ke forum internasional¹⁹

Paradigma Green Democracy berupaya men-leverage transformasi demokrasi di Indonesia dan global yang menggabungkan representasi daerah, representasi politik, dan representasi ekologis menuju suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

¹⁸ Media Indonesia. (2025, November 13). Sultan Baktiar Najamudin Jadi Keynote Speaker di COP30 Brasil. <https://mediaindonesia.com/>

¹⁹ Detik News. (2025, November 13). Jadi Pembicara Kunci di COP30 Brazil, Ketua DPD Suarakan Green Democracy. <https://news.detik.com/>

05 Penutup: Jalan ke Depan



Kegagalan 70% kebijakan iklim global bukan sekadar statistik—ini adalah panggilan untuk transformasi fundamental dalam cara kita berdemokrasi. Indonesia, dengan segala modal alamnya yang luar biasa, memiliki kesempatan historis untuk memimpin perubahan ini.

Green Democracy bukanlah utopia yang tidak realistis. Ini adalah keharusan pragmatis jika kita ingin mewariskan bumi yang layak huni kepada generasi mendatang. Sebagaimana Sultan Baktiar Najamudin menegaskan: "Jadilah intelektual yang tidak hanya cerdas berpolitik, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis. Karena sejatinya, tidak ada demokrasi yang sehat di atas bumi yang sakit."²⁰

Dengan institusi demokrasi yang inklusif, kolaboratif, dan partisipatif, masyarakat dapat menikmati kebijakan yang pro-growth, pro-youth, pro-ecology, dan pro-poor. Inilah esensi Green Democracy—sebuah rute baru bagi demokrasi Indonesia yang lebih etis, hijau, dan berkelanjutan.

20 JPNN. (2024, September 28). Luncurkan Buku Green Democracy, Sultan: Semangat Mewujudkan Keseimbangan dan Persatuan Nasional. <https://www.jpnn.com/>

Daftar Referensi

- ANTARA News. (2025, Januari 7). Biaya Politik Pemilu Legislatif 2024 Melonjak Hingga Rp5 Miliar. <https://aceh.antaranews.com/>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Data Bencana Banjir dan Longsor Sumatra November-Desember 2025. BNPB.
- Berita Buana. (2025, November 29). Ketua DPD RI Tawarkan Konsep Green Democracy di UMY. <https://beritabuana.co/>
- CNN Indonesia. (2025, November 11). Jadi Pembicara di COP30, Ketua DPD RI Tawarkan Gagasan Demokrasi Hijau. <https://www.cnnindonesia.com/>
- Detik News. (2025, November 13). Jadi Pembicara Kunci di COP30 Brazil, Ketua DPD Suarakan Green Democracy. <https://news.detik.com/>
- Harian Bhirawa. (2025, November 30). Ketua DPD RI Tawarkan Konsep Green Democracy, Politik Santun pada Manusia dan Alam. <https://harianbhirawa.co.id/>
- IPB Digitani. (2024). Indonesia Sebagai Pemilik Hutan Hujan Tropis Terbesar Ketiga di Dunia. <https://digitani.ipb.ac.id/>
- JPNN. (2024, September 28). Luncurkan Buku Green Democracy, Sultan: Semangat Mewujudkan Keseimbangan dan Persatuan Nasional. <https://www.jpnn.com/>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2022). Arti Pesan Mangrove Indonesia di G20: Atasi Krisis Iklim Global. <https://www.setneg.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2024). Menghitung Biaya Demokrasi. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/>
- LLDIKTI Wilayah V. (2025). Ketua DPD RI Dorong Green Democracy sebagai Koreksi Dominasi Ekonomi atas Ekologi. <https://lldikti5.kemdiktisaintek.go.id/>
- Media Indonesia. (2025, November 13). Sultan Baktiar Najamudin Jadi Keynote Speaker di COP30 Brasil. <https://mediaindonesia.com/>
- Mongabay Indonesia. 2025, Desember 1). Peringatan Keras dari Bencana Sumatera. <https://mongabay.co.id/>
- Prihatini, E. S., & Wardani, S. B. E. (2024). Riset Biaya Politik Caleg dalam Pemilu 2024. Westminster Foundation for Democracy.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2023). Temuan Transaksi Mencurigakan Terkait Dana Kampanye Pemilu 2024. PPATK.
- Suryatmojo, H. (2025). Bencana Banjir Bandang Sumatra dan Degradasi Hutan di Hulu DAS. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/en/news/ugm-expert-severe-sumatra-flash-floods/>
- United Nations Development Programme. (2024). UNDP Global Climate Report 2024. UNDP.
- United Nations Environment Programme. (2024). Emissions Gap Report 2024: No more hot air... please! UNEP. <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024>
- Warta Kota. (2025, November 13). DPD RI Tetapkan 9 November sebagai Hari Green Democracy. <https://wartakota.tribunnews.com/>



Penulis:

Dr. (c) Bahar Buasan, ST., M.S.M., M.Sc
www.baharbuasan.id

Penerbit:

Kontika Research and Innovation
Jakarta, Indonesia
Tahun Terbit : 2026

Hak Cipta © 2026 Kontika Research and Innovation